

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Mahasiswa Ancam Duduki Kantor Anies

### Tuntut Pembubaran TGUPP

JAKARTA - Miris, alokasi anggaran Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGUPP) kembali bakal dinaikkan dalam APBD DKI 2020. Totalnya tak tanggung tanggung, yakni mencapai Rp24, miliar untuk satu tahun. Alhasil, sejumlah kalangan meminta lembaga buatan gubernur itu diminta untuk dibubarkan.

Padahal dalam alokasi anggaran APBD 2019, Pemprov DKI menganggarkan untuk TGUPP sebesar Rp18 miliar. Dana itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan operasional lainnya.

"Harus dibubarkan saja karena tidak jelas kerjanya. Karena memang tidak ada kerjanya kok," ujar Direktur Center Budget for Analysis (CBA) Uchok Sky Khadapi, Minggu (6/10/2019).

Uchok mengaku, selama ini kinerja TGUPP belum menghasilkan apa-apa. Terlebih lagi uang yang digunakan untuk operasional berasal dari uang rakyat, dengan nilai yang fantastis. Keberadaan mereka tidak berpengaruh. "Mereka di situ ngapain kerjanya, loh tidak ada kerjaan yang dihasilkan selama ini," jelas dia.

Bahkan, menurut dia, penggunaan uang yang besar untuk honor tidak pas. Honor itu dianggap sangat besar untuk mereka yang tidak melakukan pekerjaan sama sekali ■

Selama mereka berdiri belum ada hasil yang dirasakan masyarakat. "Coba mana hasil pekerjaan mereka, apakah sudah dirasakan masyarakat," tandas Uchok.

Di sisi lain, Pengamat Perkotaan Nirwono Yogo mengatakan, sebaiknya setiap laporan kinerja TGUPP harus disampaikan ke publik. Karena selama ini masyarakat tidak mengetahui bagaimana kerjanya. "Termasuk dapat melihat prestasi apa yang sudah dicapainya," kata dia, Minggu (6/10/2019).

Menurut dia, bilamana dalam setahun ini kerjanya tidak memuaskan, seharusnya ang-

garan TGUPP dikurangi, bukan malah ditingkatkan. "Malah kalau perlu anggarannya dihapus, dan digunakan untuk keperluan lain yang langsung berhubungan dengan masyarakat," kata dia.

Nirwono mengaku, sekarang ini fungsi TGUPP belum jelas, terutama dalam membantu menyelesaikan masalah perkotaan di Jakarta. Misalkan, bagaimana solusi penataan bantaran kali, penguraian kemacetan, relokasi pemukiman kumuh. "Belum ada yang tahu hasil kerjanya," imbuh dia.

Di tempat terpisah, Ketua Komite Presidium Mahasiswa Nusantara untuk Demokrasi Ahmad Boim Alhabsi mengatakan, dalam waktu dekat mahasiswa akan mengambil langkah-langkah, kalau memang alokasi anggaran itu tidak dipangkas. Mahasiswa di Jakarta akan bergerak ke kantor gubernur. "Kami akan duduki kantor gubernur," kata dia.

Sebab, dia menilai, alokasi anggaran untuk TGUPP itu tidak relevan. Sasarannya tidak tepat. Bahkan, nilainya saja tidak sesuai dengan kerjanya.

"Kinerjanya tidak ada, ini pemborosan anggaran, bubarkan sana," jelas dia.

Seperti yang diketahui, saat ini Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2020, anggaran sementara TGUPP masuk dalam anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Nilai anggaran sementara TGUPP yang dicantumkan dalam KUAPPAS 2020 yakni sebesar Rp26,5 miliar. Sayangnya, flot

anggaran itu tidak ada rincian untuk apa saja anggarannya.

Meski begitu, kenaikan ini cukup besar yakni sebesar Rp7,5 miliar atau 40 persen dari anggaran TGUPP tahun 2019 yakni Rp18,99 miliar dari usulan sebesar Rp 28 miliar. Padahal, jauh sebelumnya pada akhir 2017 anggaran TGUPP hanya diberikan anggaran sebesar Rp2,3 miliar.

Hanya saja, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah angka kenaikan tersebut. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan, angka itu masih berupa usulan dan bisa dikoreksi.

Selain itu, pihaknya tidak tahu-menahu atas usulan itu.

"Tidak, tidak (berubah). Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," imbuh Anies, beberapa waktu lalu.

Bahkan, dalam waktu dekat, Anies memastikan akan memanggil jajaran Bappeda untuk mengkaji kembali usulan kenaikan anggaran TGUPP di 2020. "Nanti kita panggil yang mengusulkan itu," tandas dia. (dny)